TRADISI MAANTA NASI PANAMBAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)

Amelia Putri Maisa¹, Elimartati²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail : ameliaputrimaisa@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: elimartati2013@gmail.com

Abstract: *Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tradisi Maanta Nasi Panambai dalam perspektif hukum Islam di Padang Luar Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Niniak Mamak, orang yang tidak menjalankan, dan orang yang pernah menjalankan tradisi maanta nasi panambai. Selain itu data juga diperoleh dari buku-buku adat, karya ilmiah, jurnal dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun temuan penelitian ini adalah bahwa nasi panambai diantar sebelum akad nikah dan sebagai syarat untuk melaksanakan walimah atau baralek. Hal ini bertujuan untuk menjalin dan mempererat hubungan silaturahmi, dan sebagai i'lan. Akibat tidak menjalankan maanta nasi panambai anak tidak memiliki bako, orang tua dan anaknya tidak bisa memakai adat. Sebagian masyarakat menganggap berat untuk melaksanakan maanta nasi panambai dikarenakan tidak ada biaya yang cukup, menikah di rantau, dan terlalu banyak syarat-syarat atau adat yang dilaksanakan setelah maanta nasi panambai. Sedangkan sanksi tidak melaksanakan maanta nasi panambai membayar adat kapalo ameh yaitu dengan membayar dua atau tiga katidiang padi bahkan lebih sesuai kesepakatan niniak mamak dan melaksanakan adat alek tokok lutuik. Menurut hukum Islam proses pelaksanaan adat ini termasuk kepada 'urf shabih karena tidak bertentangan dengan nash dan memiliki mashlahat yang besar dan tidak menimbulkan mudharat yang besar.*

Keywords: Tradisi, Nasi Panambai, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya melakukan peran serta tindakan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri tentunya dengan adanya ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ikhlas mengikhhlaskan serta ridho meridhoi dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwasanya kedua pasangan antara laki-laki dan perempuan sudah saling ada ikatan lahir bathin. Sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tentram sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Islam telah memberikan petunjuk yang terinci tentang seluk beluk pernikahan. Dengan melaksanakan pernikahan manusia dapat melaksanakan hal-hal yang sebelumnya diharamkan oleh Allah SWT. Manusia boleh saling mencintai, mengasihi,

berbagi rasa dalam suka maupun duka serta dapat meneruskan keturunan dengan pasangannya.

Selain memenuhi ketentuan hukum Islam, dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga juga harus memperhatikan tradisi adat yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Beberapa tradisi dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga masih dipegang erat oleh masyarakat. Meskipun demikian ada beberapa kalangan yang sudah mulai meninggalkannya.

Salah satunya adalah masyarakat Padang Luar Nagari III Koto yang memiliki tradisi *maanta nasi panambai*. Tradisi ini dilaksanakan oleh pasangan yang akan menikah yang sama-sama berasal dari Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan. *Nasi panambai* adalah nasi yang diantarkan oleh ibu-ibu dari pihak perempuan kepada keluarga tertentu pihak laki-laki sebelum diadakannya akad nikah. *Nasi panambai* ini terdiri dari 4 *cambuang* nasi, 4 gelas *sala bada*, 4 gelas *samba randang*. Orang yang mengantarkan *nasi panambai* ini memakai baju *sambek batingkuluak gadang*. Pelaksanaan *maanta nasi panambai* dilaksanakan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, yaitu dengan jumlah *nasi panambai* sebanyak 4 buah yang nantinya di antar kepada ibu dari calon mempelai laki-laki, mamak kepala kaum mempelai laki-laki, pihak bako mempelai laki-laki, mamak kepala kaum pihak bako mempelai laki-laki.

Tradisi *maanta nasi panambai* ini adalah suatu kemestian dan apabila tidak dijalankan, terjadilah suatu perbuatan yang timpang. Bagi yang tidak menjalankannya akan diberikan denda. Adapun denda yang harus dibayar kepada niniak mamak yaitu *mambaia* (membayar) *kapalo ameh* (kepala emas) yaitu berupa emas atau uang yang selanjutnya akan diserahkan kepada niniak mamak. Pembayaran denda dilaksanakan di rumah mempelai wanita dan dihadiri oleh niniak mamak dari pihak laki-laki dan niniak mamak dari pihak perempuan. Setelah niniak mamak dari pihak laki-laki dan perempuan berkumpul maka niniak mamak tersebut bermusyawarah untuk menentukan banyaknya denda yang harus dibayar oleh pasangan tersebut, denda yang dipatok dengan harga padi yang mana jumlahnya sekitar dua, tiga ketiding padi dan bahkan lebih. Denda tersebut diberikan kepada niniak mamak pihak perempuan.

Apabila denda tersebut tidak diberikan kepada niniak mamak maka pasangan tersebut akan disebut-sebut sebagai orang yang tidak beradat di nagari. Apabila pasangan tersebut mempunyai keturunan atau anak maka anak dari pasangan tersebut tidak dijemput oleh bakonya atau disebut juga dengan *anak ndak babako*. Apabila anak dari keturunan tersebut menikah maka tidak diperkenankan memakai adat sebelum orang tuanya melakukan *alek tokok lutuik*. *Alek tokok lutuik* yaitu acara perhelatan untuk memakai adat kepada niniak mamak sebagai tanda peresmian perkawinan. Tujuannya untuk menghindari persangkaan buruk dan juga menghormati para niniak mamak yang ada di daerah tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adat menetapkan sanksi dengan tegas terhadap siapa saja yang melanggar dari aturan adat yang berlaku di daerah tersebut. Jika pelaku tidak sanggup memenuhi persyaratan dari *niniak mamak* maka keturunan dari pelaku tidak diperbolehkan untuk memakai adat baik dalam acara *maanta anak* atau pernikahan dari anak pelaku tersebut.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam tentang tradisi *maanta nasi panambai* di Padang Luar Nagari III Koto ini dalam perspektif hukum Islam. Ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan, antara lain; bagaimana pelaksanaan tradisi *maanta nasi panambai* di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *maanta nasi panambai* di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatannya adalah pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan tentang Tradisi *Maanta Nasi Panambai* di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari Hukum Islam. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Walimatul ‘Ursy

Walimah dalam pengertian khusus disebut “*walimah urs*” mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Walimah Urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, walimah biasa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. (A. Maudina, 2018: 17)

Menurut Sayyid Sabiq Walimah berasal dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan. (Sabiq, 1981: 184). Secara umum walimatul ‘ursy adalah pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan.

Maksud diadakannya walimah pernikahan adalah untuk pemberitahuan dan pengumuman kepada khalayak bahwa kedua hamba Allah telah melangsungkan akad nikah sehingga tidak mengakibatkan adanya fitnah (MP Jatmiko, 2019: n.d. 22). Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunah muakad (Sabiq, 2011: 512).

2. Tinjauan Umum ‘Urf

Urf adalah satu dalil hukum (*adilat al-hakam*) atas suatu perbuatan yang tidak dijelaskan ketentuannya secara terperinci dalam al-Qur`an dan Sunnah. Berdasarkan hal itu, ‘urf adalah metode atau cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam dalam kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus (Salma dan Burhanuddin, 2017: 2).

Dapat dipahami bahwa ‘urf yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa yang akal menerimanya dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Dalam definisi tersebut

terkandung beberapa aspek bahwa *'urf* selalu sejalan dengan tabiat yang masih bersih sehingga jiwa merasa tenang (Shollah, 2017: 35). Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamai konsekuensi logis (*talazumun aqliyun*) bukan adat. (Faiz Zanuddin, 2015: 391)

Penggolongan macam-macam adat atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi :

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam :
 - 1) *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan (Efendi dan. Zein, 2005: 154). Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk anak perempuan dengan tanda perempuan (*muannats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan.
 - 2) *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan jual beli barang yang enteng transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi apa-apa (Efendi dan. Zein, 2005: 154). Hal ini tidak menyalahkan aturan akad dalam jual beli dan kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada :
 - 1) *Al-'Urf 'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa (Efendi dan. Zein, 2005: 154). Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
 - 2) *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu (Efendi dan. Zein, 2005: 154). Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* itu terbagi kepada :
 - 1) *Al-'Urf ash-Shahihah* (*'Urf yang Absah*) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram (Dahlan, 2010: 210-211). Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (*hantaran*) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka "*hantaran*" yang diberikan kepada pihak laki-laki yang meminang.

'Urf dipandang *shahih* ketika kebiasaan masyarakat itu tidak menghalalkan hal-hal yang diharamkan dan tidak mengharamkan hal-hal yang halal seperti penentuan maharyang ditunaikan sebelum akad perkawinan dan mahar yang diangsur pembayarannya. (Google Cendikia: Salma &Burhanuddin, 2017, Desember 2)

- 2) 'Urf *Fashid* yaitu 'adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, kumpul kebo. (Syarifuddin, 2011, Jilid 2 :392)

Penyerapan Adat dalam Hukum

Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada 4 kelompok, yaitu:

- 1) Adat yang lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya.
- 2) Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharat kemudharatan), namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.
- 3) Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak) maksudnya, yang dikandung hanya unsur perusak.
- 4) Adat atau 'urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung maupun tidak langsung. (Syarifuddin, 2011, Jilid 2: 369)

Syarat-syarat 'Urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Menurut Djazuli dan Nurol Aen dalam bukunya "Ushul Fqih, Metodologi Hukum Islam" mengatakan syarat-syarat 'Urf adalah:

- a. Adat tersebut tidak bertentangan dengan Nash, baik al-Qur`an maupun Sunnah.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan termasuk juga adat yang berlaku tersebut dan tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- c. Tidak berlaku secara umum dalam kehidupan kaum muslimin, maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh beberapa kaum muslimin saja.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah. (Djazuli, dan Aen, 2000: 187)

3. Tinjauan Umum Adat

Menurut bahasa adat berarti 'Kebiasaan' atau 'tradisi' masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata 'adat' disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti 'hukum adat' dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut 'adat' saja. (M. Shadiqoh, 2018: n.d. 29)

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Setiap bangsa mempunyai adat atau kebiasaan sendiri-sendiri satu dengan yang lain tidak sama. Ketidaksamaan ini memperlihatkan pergaulan hidup kemasyarakatan. Adat-istiadat dan

kebiasaan yang sudah mentradisi inilah yang menjadi sumber terbentuknya hukum adat dan hukum kebiasaan. (Umar Said Sugiarto, 2013: 112)

Adat Minangkabau terdiri dari 4 macam atau 4 jenis, dikenal juga dengan *adat nan ampek*, yaitu *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, *adat nan taradat* dan *adat istiadat*. (Google Cendikia: Ririanty Yunita, dkk, 2012: 2)

a. Adat Nan Sabana Adat.

Adat nan sabana adat adalah segala aturan; ketentuan, sifat yang terdapat dalam setiap jenis benda alam, baik makhluk insan, hewani, maupun nabati. Bahkan sifat alam seperti benda yang beku dan cair, baik yang dapat diraba maupun dirasa, merupakan adat yang memang sudah diciptakan oleh sang Khalik (Google Scholar: Johan Agustin, 2014: 6). Itulah yang disebut dengan *alam takambang*. Setelah Islam masuk ke ranah Minang, adat nan sabana adat adalah alam ciptaan Ilahi. Semua ciptaan Allah Swt tidak dapat diingkari karena wujudnya memiliki aturannya masing-masing. Apai membakar dan air mengalir ke tempat yang rendah, merupakan hukum alam sebagai ketentuan Ilahi. Kedua benda ini tidak akan berubah sifatnya, kecuali atas *iradah* Allah Swt. Hal ini melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni: "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan *syara' mangato, adat mamakai*". (Google Scholar: Johan Agustin, 2014: 6)

b. Adat Nan diadatkan

Adat nan diadatkan merupakan adat yang diciptakan oleh nenek moyang orang Minang yang diwarisi secara turun temurun. Dua tokoh pencipta adat yaitu: Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggunguan, telah meletakkan dasar-dasar aturan yang dilestarikan dari *alam takambang jadi guru*.

c. Adat Nan Taradat

Adat nan taradat ialah segala aturan yang disusun dari hasil musyawarah mufakat para penghulu dan Niniak Mamak dari tiap Nagari. Aturan ini diturunkan dari adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan (Amir M. S, 2011:82-83). Pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap nagari yang bersangkutan. Jadi, ada kemungkinan adat suatu nagari berbeda dengan adat nagari yang lain,

d. Adat Istiadat

Yang dimaksud dengan adat istiadat ialah berkaitan dengan kata pepatah : *dimano batang taguliang. Disinan tindawan tumbuhan, dimano tanah dipijak, disinan langik dijunjuang*. Kata-kata tersebut mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau bisa juga dikisahkan sebagai berikut: *dimano aia urang disawuak, disinan adat urang dituruik*. (Anwar, 1997:56-58) Adat nan taradat dan adat istiadat ini, oleh niniak mamak moyang kita disebut dengan adat nan babuhua sintak dan berlaku di nagari masing-masing dan adat ini boleh berubah, ditambah, dikurangi asal disepakati bersama di nagari melalui musyawarah mufakat. (Rajo Pangulu [t.th]: 14-17)

4. Pelaksanaan Tradisi Maanta Nasi Panambai di Padang Luar Nagari III Koto

a. Pelaksanaan tradisi *maanta nasi panambai* ini secara garis besar dapat dilihat dari 5 point. Proses tradisi *maanta nasi panambai* yaitu *Nasi panambai* diantar ke rumah

keluarga / mamak laki-laki, yang dilakukan oleh ibu-ibu dari pihak perempuan sebanyak 4 cambuang nasi, 4 galeh sala bada, 4 galeh samba randang dibungkus pakai kain basambek, 4 nasi tersebut diantarkan ke Ibu dari calon mempelai laki-laki, Mamak kepala kaum mempelai laki-laki, Kepada pihak bako mempelai laki-laki, Mamak kepala kaum pihak bako mempelai laki-laki. ibu-ibu yang mengantarkan nasi panambai mamakai baju *sambek batingkuluak gadang*. Setelah itu, nasi yang dianta tadi di tukar dengan beras, setelah itu mamak dari pihak perempuan memusyawarahkan hari yang dipakai untuk baralek.

- b. Tujuan *maanta nasi panambai* adalah Untuk menjalin dan mempererat hubungan silaturrahi, Supaya pernikahannya di ketahui oleh orang banyak bukan hanya orang-orang terdekat saja, Supaya pernikahan beradat menurut adat salingka nagari. Jika seseorang baralek belum memakai adat, maka belum bisa memakai adat sebelum melakuakn *alek tokok lutuik*. Sebagai upaya pencegahan agar anak dan *bako* tetap bisa melakukan hubungan adat.
- c. Akibat tidak menjalankan *maanta nasi panambai* yaitu Anak tidak memiliki *bako*, bukan berarti memutus hubungan antara anak dan *bakonya* hanya saja antara anak dan *bakonya* tidak bisa melakukan hubungan adat, Orang tua dan anaknya tidak bisa memakai adat, Kurang harmonisnya hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan karena merasa tidak menghargai adat yang ada.
- d. Alasan tidak menjalankan *maanta nasi panambai* karena sebagian masyarakat menganggap berat untuk melaksanakan *maanta nasi panambai* ini, dikarenakan: Tidak ada biaya yang cukup untuk melaksanakan adat tersebut dan masih banyak syarat-syarat dan adat-adat yang dibutuhkan dan memakan waktu yang lama dan Menikah di rantau.
- e. Sanksi Tidak Melakukan Tradisi *Maanta Nasi Panambai* yaitu Membayar satu katidiang , 2 atau 3 katidiang padi sesuai mufakat niniak mamak dan melaksanakan adat *alek tokok lutuik*.

5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Maanta Nasi Panambai di Padang Luar

Pelaksanaan walimah diadakan menurut hukum adat, tetapi hukum adat yang dimaksud bukan termasuk kepada adat yang *fasid* tetapi termasuk kepada adat yang *shahih*. Menurut penulis, bahwa tradisi *maanta nasi panambai* dalam *baralek* adalah termasuk kepada golongan *Urf Shahih*. Hal ini berdasarkan syarat-syarat *Urf* dijadikan sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut:

1. Adat tidak bertentangan dan melanggar dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
 Mengenai pelaksanaan tradisi *maanta nasi panambai* ini tidak ada dalil yang melarang dan menyuruh terhadap perbuatan adat yang dilakukan oleh masyarakat di Padang Luar ini dan juga tidak menimbulkan mafsadat yang terlalu besar
2. Adat atau *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
 Berdasarkan adat yang ada di Padang Luar bahwa pelaksanaan *maanta nasi panambai* mengandung nilai-nilai kebaikan (maslahat) yaitu untuk memperkokoh hubungan silaturrahi antara anak dengan keluarga bakonya, karena kalau tidak melaksanakan *maanta nasi panambai* antara bako dan anak tidak dapat

melaksanakan hubungan adat, dan anak tidak terlalu dekat dengan bakonya yang lain, hanya dekat dengan bako kontannya saja. Jika dilihat peran bako di Padang Luar ini penting supaya bisa melaksanakan adat yang berlaku di Padang Luar dan juga terjadi komunikasi dan hubungan silaturrahi yang semakin kuat, sebagaimana firman Allah Swt yang memerintahkan kita agar saling kenal mengenal dalam al-Qur'an surat al-Hujurat: 13, yang artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dilihat dari segi kemashlahatan jika dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* termasuk kepada setingkat *tahsiniah* atau pelengkap dari pada kegiatan *walimatul 'ursy*.

3. 'Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Sesuai dengan adat yang berlaku di Padang Luar harus dijalankan oleh setiap mereka yang melaksanakan pernikahan.
4. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *Urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *Urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Pemberlakuan adat ini sudah turun temurun dan merupakan adat yang berlaku di Padang Luar atas hasil keputusan dan kesepakatan ninik mamak dan perangkat adat Nagari tersebut.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan tradisi *maanta nasi panambai* merupakan aturan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun yang terus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada pada masyarakat Padang Luar. Islam memandang sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dan dipandang baik oleh masyarakat disebut '*urf*.' *Urf* yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi *maanta nasi panambai* adalah '*urf shahih* karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya '*Urf* sebagai landasan hukum.

Menurut penulis sanksi yang diberikan yaitu sanksi membayar *kapalo ameh* berupa 2 atau 3 *katidiang* padi termasuk '*urf sahiih*, karena pemberian sanksi ini bertujuan agar nantinya masyarakat tidak mudah melanggar aturan adat. Selain itu sanksi bagi yang tidak menjalankan tradisi *maanta nasi panambai* ini menggunakan '*urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.

Pada masyarakat Padang Luar, seperti yang dijelaskan di atas apabila ada pihak yang tidak menjalankan tradisi *maanta nasi panambai* maka akan diberikan sanksi. Adapun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk tidak memaksakan kehendak dan supaya anak kemenakan tidak menikah keluar sebaiknya menjalankan sanksi adat tersebut. Sanksi tersebut jika di dibandingkan dengan melaksanakan adat lebih kecil biaya membayar denda dari pada menjalankan adat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Insyirah ayat 6:

إِن مَّعَ الْعَسْرِ يَسْرًا

Artinya : Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

Jika dilihat dari karakteristik hukum Islam, maka pelaksanaan tradisi *maanta nasi panambai* tidak menimbulkan beban yang berlebihan kepada mereka yang melaksanakannya walaupun membutuhkan biaya untuk melaksanakannya namun itu tidak terlalu besar, bahkan praktek seperti ini harus dapat memicu terealisasinya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi mereka yang menjalankannya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah, adapun kesimpulan yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *maanta nasi panambai* pada masyarakat Padang Luar diawali dengan 3 proses. Tujuan *maanta nasi panambai* adalah untuk menjalin dan mempererat hubungan silaturahmi, sebagai *i'lan* dalam pernikahan, menjalin silaturahmi antara kedua keluarga. Akibat tidak menjalankan *maanta nasi panambai* di antaranya anak tidak memiliki *bako*, orang tua dan anaknya tidak bisa memakai adat. Bahwa sebagian masyarakat menganggap berat untuk melaksanakan proses adat *maanta nasi panambai* ini, dikarenakan tidak ada biaya yang cukup untuk *baralek*, menikah di rantau dan terlalu banyak syarat-syarat dan adat-adat yang dibutuhkan dan memakan waktu yang lama. Sanksi tidak melaksanakan *maanta nasi panambai*: membayar adat *kapalo ameh* yaitu membayar 2 atau 3 katidiang padi sesuai mufakat niniak mamak dan melaksanakan adat *alek tokok lutuik*.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *maanta nasi panambai* di Padang Luar dilaksanakan secara turun temurun yang terus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat. Dalam Hukum Islam, sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus, dipandang baik dan tidak bertentangan dengan hukum syara' dalam hal ini sejalan dengan '*urf*'. '*Urf*' yang terdapat di dalam pelaksanaan Tradisi *Maanta nasi panambai* di Padang Luar adalah '*urf shahih*' karena memenuhi syarat '*urf*' yang dapat dilaksanakan, dan juga *maanta nasi panambai* ini merupakan suatu *i'lan* pernikahan, mengenai *i'lan* pernikahan dianjurkan untuk melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S. (2011). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Rineka Media.
- Annisa Syntia Trimilinda & Desriyeni. (2018). "Purwarupa Eksiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau" dalam *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan* 7 (1): 205 pada <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/100978>. Diakses pada 20 Mei 2020 (15. 00)
- Anwar. C. (1997). *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Bandung: Rineka Cipta.
- Ayik Muhammad Zaki. (2018). "Tradisi Tonjokan pada Walimatul 'Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau". 24(2):18 pada <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8125> . Diakses pada 20 Mei 2020 (15. 00)

- Dahlan, A. (2010). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dzajuli & Aen. N. (2000). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, S. & Zein. M. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Faiz Zainuddin. (2015). "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" dalam *Jurnal Lisan Al-Hal* 9 (2):391 pada <http://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/93>. Diakses pada 20 Mei 2020 (15. 00)
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Bandar Maju.
- Hanafi, A. (1981). *Ushul Fiqh*. Jakarta:Widjaya.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wacana Ilmu.
- Jalaluddin. (2017). "Tradisi Bekhalek dalam Walimatul 'Ursy di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Menurut Mazhab Syafi'i" pada <http://repository.uinsu.ac.id/3713/1/SKRIPSI%20%20JALALUDDIN%20NIM%2021133015.pdf>. Diakses pada 20 Mei 2020 (15.00)
- Johan Agustin. (2014). "Pangkatan Urang Bainduak pada Masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji" dalam *Jurnal Premise Law* (4): 6 pada <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/8648>. Diakses pada 20 Mei 2020 (15. 00)
- Kasmidin. (2011). *Al- Qawaed al-Fiqhiyyah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mufidah. (2010). *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. UIN: Maliki Press.
- Musbikin, I. (2009). *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Jakarta:Kencana.
- Navis. A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers.
- RB Harahap. (2018). "Walimatul Ursy". 24(2):12 pada <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/878>. 20 Mei 2020 (15.00)
- Ririanty Yunita, dkk. (2012). "Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman" dalam *Jurnal Penelitian Kebudayaan*. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=jurnal+tentang+Penelitian+Kebudayaan+Uang+Japuik+Dalam+Adat+Perkawinan+Padang+Pariaman&btnG=. Diakses pada 20 mei 2020
- Sabiq, S. (2011). *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqih Sunah, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Salma dan Burhanuddin. (2017). "Kajian 'Urf Pada Tradisi Rompak Paga di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat" dalam *Jurnal Al-Ihkam*. 24 (2): 316 pada <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1458>. Diakses pada 20 Mei 2020 (15.00)
- Sigo, Z. [t.th] *Budaya Alam Minangkabau*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto. S. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, Umar Said. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmasari. F. (1986). *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jakarta: CV. Karya Indah.
- Syahril. (2013). *Perkawinan dalam Perspektif Al-Quran*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pernada Media.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sahrani, S. (2009). *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uman, C. (2010). *Ushul Fiqih I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wiranto, I Gede. (2005). *Hukum adat Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Zain, S. M. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zulkarnaini dkk. (t.t). *Minangkabau Ranah Nan Den Cinto*. Bukittinggi: Usaha Ikhlas.